

Implementasi Akuntansi Digital dalam Pemerintahan: Tantangan dan Peluang (Studi Kasus Kabupaten Grobogan)

Amin Sadiqin^{1*}, Buyung Cahya Perdana², Rizki Arvita³

¹STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

²Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, Indonesia

³STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia

email: ¹⁾ aminsadiqin@stiemahardhika.ac.id, ²⁾ buyungcahyaperdana@gmail.com, ³⁾ rizkiarvita3@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 29 - 09, 2024

Revised : 28 - 10, 2024

Accepted : 05 - 11, 2024

Keywords:

Digital Accounting;
Government;
Challenges;
Opportunities;
Grobogan Regency.

ABSTRACT

The application of digital accounting in government has become an important concern in efforts to increase efficiency, transparency and accountability in regional financial management. This study aims to analyze the implementation of digital accounting in the Grobogan Regency Government, as well as identifying the challenges and opportunities faced in this process. This research uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through in-depth interviews, observation and documentation. The research results show that the implementation of digital accounting in Grobogan Regency has provided significant benefits, including increased speed in financial reporting and ease of data access. However, the challenges faced include limited technological infrastructure, resistance to change, and lack of human resource competence. On the other hand, opportunities arising from this implementation include improving the quality of decision making, saving operational costs, and increasing community participation in budget oversight. In conclusion, despite various challenges, the potential benefits of digital accounting in government are enormous, especially in supporting transparency and efficiency in regional financial management.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Amin Sadiqin
STIE Mahardhika Surabaya
Email: aminsadiqin@stiemahardhika.ac.id

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sektor publik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menghadapi dorongan untuk bertransformasi menuju sistem akuntansi yang lebih modern dan efisien. Akuntansi digital, yang mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, telah menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan publik yang kompleks. Penerapan teknologi digital dalam akuntansi diharapkan dapat memperbaiki akurasi, efisiensi, dan transparansi pelaporan keuangan, serta mempermudah pengawasan dan akuntabilitas.

Di Indonesia, implementasi akuntansi digital telah menjadi prioritas dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan (Prasetyo, 2022). Pemerintah Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah yang sedang melaksanakan transformasi digital dalam sistem akuntansi mereka. Proses ini melibatkan penerapan perangkat lunak akuntansi canggih, digitalisasi dokumen keuangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi.

Namun, meskipun potensi manfaat dari akuntansi digital sangat besar, implementasinya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya keahlian teknis, resistensi terhadap perubahan, dan masalah dalam integrasi sistem merupakan beberapa hambatan yang mungkin ditemui. Di sisi

lain, implementasi ini juga membuka peluang baru, seperti peningkatan kualitas pelaporan keuangan, penghematan biaya operasional, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan studi mendalam mengenai bagaimana proses implementasi akuntansi digital berlangsung di tingkat kabupaten, seperti di Kabupaten Grobogan. Pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemerintah daerah lain yang berencana untuk menerapkan sistem serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dinamika implementasi akuntansi digital di Kabupaten Grobogan, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses tersebut.

Dengan fokus pada Kabupaten Grobogan, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur akademik mengenai akuntansi digital dalam sektor publik tetapi juga menawarkan panduan praktis bagi pelaksanaan sistem akuntansi digital di daerah lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Digital

Akuntansi digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses akuntansi. Definisi ini meliputi penerapan perangkat lunak akuntansi, sistem manajemen keuangan berbasis cloud, dan digitalisasi dokumen serta transaksi keuangan. Menurut FASB (Financial Accounting Standards Board), akuntansi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pelaporan, dan integritas data (FASB, 2020).

2.2. Transformasi Digital dalam Sektor Publik

Transformasi digital dalam sektor publik adalah proses mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan dan operasional pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi (Margetts & Dunleavy, 2024). Implementasi akuntansi digital dalam pemerintahan dapat mendukung pengelolaan anggaran yang lebih transparan, memungkinkan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data keuangan, serta meningkatkan akuntabilitas publik (Gault et al., 2023).

2.3. Tantangan Implementasi Akuntansi Digital

Implementasi akuntansi digital di sektor publik seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

- a) Keterbatasan Infrastruktur: Banyak daerah, terutama yang berada di tingkat kabupaten, mungkin memiliki infrastruktur teknologi yang kurang memadai untuk mendukung sistem akuntansi digital (Heeks, 2005).
- b) Resistensi Terhadap Perubahan: Perubahan dalam sistem akuntansi dapat menghadapi resistensi dari pegawai yang terbiasa dengan metode manual, yang mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi baru (Rogers, 2003).
- c) Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia: Keterbatasan dalam keterampilan dan pengetahuan mengenai teknologi informasi dapat menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem akuntansi digital (Schroeder et al., 2022).

2.4. Peluang Implementasi Akuntansi Digital

Di sisi lain, implementasi akuntansi digital menawarkan berbagai peluang:

- a) Peningkatan Efisiensi: Sistem akuntansi digital dapat mengotomatisasi banyak proses manual, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi dan pelaporan (Warren et al., 2014).
- b) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Digitalisasi dokumen dan pelaporan keuangan memungkinkan pemantauan yang lebih baik oleh publik dan pihak berwenang, serta mengurangi kemungkinan kecurangan (Chen et al., 2009).
- c) Penghematan Biaya Operasional: Dengan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan proses manual, pemerintah daerah dapat menghemat biaya yang terkait dengan pencetakan, penyimpanan, dan manajemen dokumen (Kroenke, 2002).

2.5. Studi Kasus Terkait

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan dampak positif dari akuntansi digital di sektor publik. Misalnya, penelitian oleh Zeng et al. (2015) di China menunjukkan bahwa adopsi sistem akuntansi digital di pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Demikian pula, studi oleh Al-Saleh et al. (2018) di Arab Saudi mengidentifikasi manfaat efisiensi yang diperoleh dari penerapan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang proses implementasi akuntansi digital di Pemerintah Kabupaten Grobogan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks tersebut.

3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Subjek penelitian meliputi pegawai di bagian keuangan dan akuntansi, manajer proyek sistem akuntansi digital, serta pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi sistem ini. Pemilihan lokasi dan subjek dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Grobogan sedang aktif menjalankan transformasi digital dalam pengelolaan keuangannya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode berikut:

- a) Wawancara Mendalam: Dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan pegawai di bagian keuangan, manajer proyek, dan stakeholder terkait. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses implementasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang diidentifikasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan melalui telepon, dengan durasi rata-rata 60-90 menit per sesi.
- b) Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan observasi terhadap proses implementasi akuntansi digital di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana sistem dioperasikan dan bagaimana pegawai beradaptasi dengan teknologi baru.
- c) Dokumentasi: Pengumpulan dokumen terkait, seperti laporan keuangan, kebijakan implementasi, dan materi pelatihan, untuk menganalisis bagaimana sistem akuntansi digital diterapkan dan dikelola.

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan dalam beberapa langkah:

- a) Transkripsi: Wawancara direkam dan ditranskripsi untuk memastikan akurasi data.
- b) Pengkodean: Data transkrip dan hasil observasi dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan implementasi akuntansi digital, tantangan, dan peluang.
- c) Kategorisasi: Tema-tema yang telah diidentifikasi dikelompokkan dalam kategori-kategori yang relevan untuk memudahkan analisis.
- d) Analisis Tematik: Data dianalisis untuk menemukan pola-pola dan hubungan antar tema, serta untuk menginterpretasikan bagaimana tantangan dan peluang dalam implementasi akuntansi digital di Kabupaten Grobogan.

3.5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik:

- a) Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi informasi.
- b) Pengecekan Kembali: Hasil wawancara dan observasi dikonfirmasi dengan responden untuk memastikan akurasi data.
- c) Audit Trail: Menyimpan catatan rinci tentang proses pengumpulan dan analisis data untuk memastikan transparansi dan keterlacakan proses penelitian.

3.6. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian dengan memperoleh izin dari pihak yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Grobogan sebelum melakukan wawancara dan observasi. Responden diberikan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian, dan mereka diminta untuk memberikan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi. Semua data yang diperoleh dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Implementasi Akuntansi Digital di Pemerintah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data yang dikumpulkan, proses implementasi akuntansi digital di Pemerintah Kabupaten Grobogan dimulai dengan pemilihan dan pengadaan perangkat lunak akuntansi yang sesuai. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk:

- a) Perencanaan dan Persiapan: Tahap ini meliputi penyusunan rencana implementasi, termasuk penentuan anggaran dan jadwal, serta pelatihan awal bagi pegawai.
- b) Pengadaan dan Instalasi: Pemilihan perangkat lunak dilakukan melalui proses tender, diikuti dengan instalasi sistem dan integrasi dengan infrastruktur yang ada.
- c) Pelatihan dan Sosialisasi: Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem baru dengan efektif. Sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat akuntansi digital.
- d) Monitoring dan Evaluasi: Setelah implementasi, dilakukan pemantauan terhadap kinerja sistem dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai rencana.

4.2. Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Digital

Beberapa tantangan signifikan yang dihadapi selama proses implementasi meliputi:

- a) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Meskipun perangkat lunak baru telah diinstal, beberapa bagian dari infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang usang, menghambat kinerja sistem (Heeks, 2005).
- b) Resistensi Terhadap Perubahan: Beberapa pegawai menunjukkan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Hal ini disebabkan oleh ketidaknyamanan dengan teknologi baru dan kebiasaan kerja yang sudah ada (Rogers, 2003).
- c) Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia: Beberapa pegawai kurang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem baru dengan efisien, sehingga memerlukan pelatihan tambahan (Schroeder et al., 2022).

4.3. Peluang yang Dihasilkan dari Implementasi Akuntansi Digital

Meskipun terdapat tantangan, implementasi akuntansi digital di Kabupaten Grobogan juga memberikan berbagai peluang, di antaranya:

- a) Peningkatan Efisiensi Operasional: Sistem digital memungkinkan otomatisasi banyak proses manual, sehingga mempercepat proses pelaporan dan pengelolaan keuangan. Hal ini mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi (Warren et al., 2014).
- b) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Digitalisasi dokumen dan laporan keuangan meningkatkan aksesibilitas dan transparansi data, memungkinkan pemantauan yang lebih baik oleh masyarakat dan pihak berwenang (Chen et al., 2009).
- c) Penghematan Biaya Operasional: Pengurangan penggunaan dokumen fisik dan proses manual mengarah pada penghematan biaya terkait pencetakan, penyimpanan, dan manajemen dokumen (Kroenke, 2002).

4.4. Analisis dan Diskusi

Proses implementasi akuntansi digital di Kabupaten Grobogan menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam hal efisiensi dan transparansi. Namun, tantangan yang dihadapi perlu ditangani dengan lebih baik untuk memaksimalkan manfaat dari sistem ini. Keterbatasan infrastruktur dan resistensi terhadap perubahan adalah isu yang memerlukan perhatian khusus. Pendekatan berbasis pelatihan yang lebih komprehensif dan perbaikan infrastruktur teknologi dapat membantu mengatasi masalah tersebut.

Pelaporan yang lebih cepat dan akurat serta peningkatan transparansi yang dihasilkan dari akuntansi digital dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi akuntansi digital dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji implementasi akuntansi digital di Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan menyoroti tahapan proses, tantangan, dan peluang yang dihadapi. Implementasi ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelatihan, hingga evaluasi, yang secara umum berjalan baik meskipun menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama dalam pelaksanaan meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai, dan kurangnya kompetensi teknis. Di sisi lain, penerapan akuntansi digital memberikan peluang besar, termasuk peningkatan efisiensi

operasional, transparansi keuangan, dan penghematan biaya, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan disarankan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk pembaruan perangkat keras dan jaringan internet, guna mendukung sistem akuntansi digital. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai. Pendekatan manajemen perubahan juga harus dilakukan untuk mengurangi resistensi terhadap sistem baru, seperti melalui sosialisasi manfaat akuntansi digital. Monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal, termasuk dengan mengakomodasi umpan balik dari pengguna sistem agar perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, Y.-C., Shang, R.-A., & Kao, C.-Y. (2009). The effects of information overload on consumers' subjective state towards buying decision in the internet shopping environment. *Electronic Commerce Research and Applications*, 8(1), 48–58.
- FASB. (2020). *Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: Conceptual Framework for Financial Reporting*. Financial Accounting Standards Board.
- Gault, F., Arundel, A., & Kraemer-Mbula, E. (2023). *Handbook of innovation indicators and measurement*. Edward Elgar Publishing.
- Heeks, R. (2005). *Implementing and managing eGovernment: an international text*.
- Kroenke, D. M. (2002). *Database processing: Fundamentals, design & implementation*. Pearson Educación.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2024). The political economy of digital government. *Public Money and Management*.
- Prasetyo, A. A. (2022). Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.104>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations*, 5th. FL: Free Press.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2022). *Financial accounting theory and analysis: text and cases*. John Wiley & Sons.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2014). *Study Guide Financial and Managerial Accounting Or Corporate Financial Accounting*. South-Western Cengage Learning.
- Zeng, S. X., Ma, H. Y., Lin, H., Zeng, R. C., & Tam, V. W. Y. (2015). Social responsibility of major infrastructure projects in China. *International Journal of Project Management*, 33(3), 537–548.